

Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan

ERFINA

Abstract

The goal of this research is to determine: one, the application of good governance principle to manage urban poverty relief project. Two, the obstructive factors in applying good governance principle to manage urban poverty relief project.

The methods used to collect data are: (1) observation, (2) questionnaire, (3) interview, (4) literature study. The population and samples takes eighty-one (81) people. And the data analysis technique used is qualitative-descriptive analysis.

The conclusions: (1) the application of good governance principle to manage urban poverty relief project has not yet reached maximal target. The target reached only 36,49%. (2) The obstructive factors in applying good governance principle are: (a) less optimal officers' performance that shows 34,57% percentage. The reason is lack of awareness to accomplish the job and responsibility. (b) family-center culture is thick, which shows 48,14% percentage. In context of poverty relief, it lacks objectivity and less-accurate target. (c) less amount of society's participation which shows 48,15% percentage. The reason is also lack of awareness and sense of belonging to the program.

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang baru memperoleh kemerdekaannya pada perang Dunia II sehingga dapat dikatakan Indonesia masuk dalam Negara-negara berkembang yang ditandai dengan upaya yang mengarah pada kebijakan dan prioritas pembangunan disegala bidang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan kehidupan seluruh warga masyarakat.

Pembangunan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dilaksanakan sejak tahun 1945 sampai sekarang ini, sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan nasional, yaitu adil, makmur, merata material dan spiritual, yang realisasi pencapaiannya tidak semudah membalikkan telapan tangan, namun harus dengan usaha dan kerja keras.

Kenyataan sekarang membuktikan bahwa Indonesia benar-benar telah berada dalam kondisi krisis multidimensional. Krisis politik yang belum menunjukkan gejala semakin baik yang ditandai dengan berbagai konflik, baik di tingkat elit maupun arus bawah. Hal ini disebabkan karena kaum elit politik muncul dalam bentuk tidak memiliki wadah organisasi yang mampu memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Krisis sosial dengan munculnya berbagai aksi anarkis dan penjarahan yang

mengarah pada tindakan kriminalitas yang mewarnai pemberitaan, baik di media elektronik maupun media cetak setiap harinya. Krisis hukum dengan belum ditegakkannya sendi-sendi hukum ditengah-tengah masyarakat sehingga menumbuhkan perilaku main hakim sendiri, sebagai akibat apatisme masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Krisis ekonomi yang ditandai semakin lemahnya nilai tukar rupiah, pengangguran yang semakin membengkak, iklim investasi yang masih suram dan sebagainya. Krisis ekonomi tersebut di atas, mengakibatkan sempitnya lapangan kerja dan rendahnya penghasilan sebagian besar masyarakat, sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sampai batas yang layak. Krisis aset yang ditandai dengan rendahnya kepemilikan masyarakat dalam berbagai hal yang dapat menjadi modal hidup mereka, termasuk kualitas sumber daya manusia, perlambang biaya kerdil dana dan perumahan serta pemukiman yang tidak layak. Hal tersebut, menyebabkan muncul dugaan bahwa krisis tersebut dipicu oleh karena pemerintah yang tidak mempunyai visi yang jelas, bahkan seringkali menjadi sumber dari krisis itu. (Imamudin, 207-208).

Sejarah mencatat, pola-pola pembangunan sentralistis yang selama ini diterapkan secara sistematis yang mampu

membuat fakum atau mematikan inisiatif masyarakat lokal yang ada. Dominasi atas segala aspek kehidupan masyarakat yang sangat kuat, memperlemah kedudukan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Bahkan berbagai krisis yang dimaksud sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan suatu proyek pembangunan, namun kenyataannya lebih mengutamakan kepentingan pemilik atau pelaksana proyek tersebut, tanpa memiliki tanggung jawab nasional yang kuat terhadap kepentingan masyarakat. Jelasnya institusi tersebut hanya merupakan sebatas organ proyek, dan bukan menjadi institusi yang dapat menjadi wadah untuk menyalurkan aspirasi, inisiatif maupun sebagai alat kontrol masyarakat terhadap pemecah suatu masalah seperti kemiskinan dan pembangunan diwilayahnya. (Tim Koordinasi TKP3 KPK, 2004:36).

Masyarakat benar-benar telah menjadi obyek dan bukan pelaku utama serta pemilik kedaulatan, melainkan hanya dijadikan pengikut dari golongan atau elit-elit tertentu yang bertingkah laku sebagai pemilik kedaulatan. Perpecahan masyarakat dalam berbagai golongan menjadi semakin tajam, seiring dengan makin mudarnya perekat kehidupan masyarakat dalam bentuk tatanan nilai-nilai setempat, baik yang berkaitan

dengan nilai-nilai kemanusiaan maupun nilai-nilai budaya kemasyarakatan.

Dewasa ini, administrasi publik telah menunjukkan adanya kecenderungan pergeseran dominasi peranan sektor publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik ke arah peranan sektor swasta dan masyarakat pada umumnya. Peningkatan peran swasta, terutama Lembaga Swadaya Masyarakat terlihat penguatannya sejak komitmen reformasi dicanangkan dalam tahun 1997/1998 yang lalu. Berbagai kecenderungan tersebut mengarah kepada upaya untuk berbagi tugas dan tanggungjawab membangun bangsa secara bersama-sama antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat dalam arti tidak lagi hanya mengandalkan kepada salah satu pihak saja, apakah itu peranan pemerintah atau peranan swasta dan masyarakat. (Edy Topo Ashari, 2001:1).

Pola interaksi dan kolaborasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat yang sering disebut dengan istilah kemitraan itu telah banyak dilakukan di berbagai sektor, seperti dalam program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial lainnya. Pola pengelolaan program tersebut pada umumnya diarahkan untuk menentukan bentuk-bentuk yang tepat dalam rangka memecahkan berbagai permasalahan dalam

masyarakat, atau mungkin juga dalam rangka menemukan format baru dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.

Sejalan dengan komitmen nasional untuk melakukan transformasi dan reformasi di segala bidang. Bentuk-bentuk kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat secara nyata terlihat dalam berbagai upaya kolaborasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, pengendalian dan pengawasan jalannya pemerintahan penyelenggaraan program pembangunan dan pelayanan publik, maupun dalam rangka pengelolaan bersama prasarana dan sarana publik.

Pemerintah Indonesia, melalui Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah telah melakukan berbagai upaya penanganan masalah kemiskinan di perkotaan. Salah satu diantaranya ialah Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan yang dilaksanakan sejak tahun 1999. Proyek ini juga telah memberi arah perencanaan pembangunan nasional, melalui Kepala Bappenas menetapkan Surat Keputusan tentang tim pengarah dan tim pelaksana inter Departemen mengenai Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan. Dengan mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2001 jo Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2002

tentang penanggulangan kemiskinan. Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan ini dirancang sebagai gerakan bersama yang terpadu dalam menangani penanggulangan kemiskinan melalui proses pemberdayaan masyarakat lokal dengan mewujudkan kelembagaan masyarakat, yakni Badan Keswadayaan Masyarakat sebagai badan pengendali pengelolaan dana bantuan langsung masyarakat yang merupakan pemeduli terhadap kemiskinan dalam komunitasnya. Pemberdayaan ini memerlukan keterlibatan berbagai pihak antara lain pemerintah daerah, swasta dan masyarakat luas yang mandiri.

Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan ini mengembangkan konsep penanggulangan secara komprehensif dan utuh dengan memotivasi perubahan perilaku melalui Badan Keswadayaan Masyarakat dengan proses transformasi sosial dan memberdayakan kondisi masyarakat, sebagai salah satu amanah dari UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan implementasi dari konsep *good governance* itu sendiri, di mana esensi otonomi daerah adalah masyarakat atau otonomi rakyat. Masyarakat yang berdaya pada arus mikro tidak hanya berdaya dalam arti mampu meningkatkan kesejahteraan mereka secara swadaya masyarakat dan dalam kemandirian namun juga secara kolektif mampu

mendesakkan suara dan aspirasinya dalam proses penentuan kebijakan publik.

Konsep yang ditawarkan melalui proyek ini, memang dapat dikatakan ideal, tetapi belum dapat menjamin implementasi dan keberhasilannya. Dengan belajar dari program-program penanggulangan kemiskinan yang terdahulu masih terdapat banyak kekurangan seperti : kebijakan bantuan belum bersifat menyeluruh dan berkelanjutan, kurang koordinasi, kurang transparan, kurang tepat sasaran, kurang memberdayakan masyarakat serta kerap kali disalahgunakan. (Sadji, 2004:9).

Bertolak dari uraian latar belakang di atas, merupakan alasan peneliti untuk memilih dan menetapkan serta berupaya meneliti program tersebut dengan menitikberatkan pada penerapan prinsip *good governance*.

B. KEPEREMINTAHAN (GOVERNANCE)

1. Konsepsi Pemerintahan yang baik (Good Governance)

Pemahaman umum tentang *good governance* mulai mengemuka di Indonesia sejak tahun 1990-an dan semakin populer pada era tahun 2000-an. Pemerintahan yang baik banyak diperkenalkan oleh lembaga donor atau

pemberi pinjaman luar negeri seperti *World Bank*, *ASEAN Development Bank*, IMF maupun lembaga-lembaga pemberi pinjaman lainnya yang berasal dari negara-negara maju. *Good Governance* dijadikan aspek pertimbangan lembaga donor dalam memberikan pinjaman maupun hibah

Secara konseptual pengertian kata baik (*Good*) dalam istilah pemerintahan yang baik (*good governance*) mengandung dua pemahaman: Pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Berdasarkan pengertian ini menurut Edy Topo Ashari (2001:63) bahwa pemerintahan yang baik berorientasi pada dua hal yaitu :

1. Orientasi ideal Negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional; dan
2. Pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien

melakukan upaya pencapaian tujuan nasional.

Peraturan Pemerintah No.101 Tahun 2000, memutuskan pengertian Kepemerintahan yang Baik (*good governance*) yaitu: “Kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.” (Edy Topo Ashari, 2001:63)

UNDP (*United Nations Development Program*) mendefinisikan *good governance* sebagai pelaksanaan otoritas politik, ekonomi dan administrasi untuk mengatur urusan – urusan Negara, yang memiliki mekanisme, proses, hubungan, serta kelembagaan yang kompleks di mana warga Negara dan berbagai kelompok mengartikulasikan kepentingan mereka, melaksanakan hak dan kewajiban mereka serta menengahi perbedaan yang ada di antara mereka. (Wigrantoro, 2004 :3)

Good governance dilihat dari sisi luar organisasi seolah merupakan refleksi perilaku institusi. Namun demikian, jika kita kaji lebih mendalam, *good governance* dari sebuah organisasi merupakan agregat perilaku individu

yang taat dan tunduk pada ketentuan (*regulatory*) yang telah ditetapkan. Ketentuan ini biasanya menyangkut tentang batasan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan atau petunjuk/prosedur pelaksanaan suatu aktivitas dalam rantai nilai pelayanan kepada *stakeholder*. Dengan demikian, *good governance* mencerminkan bagaimana manusia berkarya secara benar, benar dalam pengertian sesuai dengan ketentuan regulasi yang telah ditetapkan. (Wigrantoro, 2004 : 1)

2. Karakteristik *good governance* menurut Sekretariat Pengembangan *Public Good Governance* Bappenas setidaknya ada empat belas karakteristik dalam wacana *good governance*:

- a. Berwawasan ke depan (visi strategis); semua kegiatan pemerintahan berupa pelayanan publik dan pembangunan di berbagai bidang seharusnya didasarkan pada visi dan misi tertentu disertai strategi implementasi yang jelas.
- b. Terbuka (transparan); semua urusan tata pemerintahan berupa kebijakan – kebijakan publik baik yang berkenaan dengan pelayanan publik maupun pembangunan di daerah harus diketahui publik. Isi keputusan dan alasan pengambilan kebijakan publik

harus dapat diakses oleh publik dan harus diumumkan agar mendapat tanggapan publik. Demikian pula informasi tentang kegiatan pelaksanaan kebijakan tersebut dan hasil – hasilnya harus terbuka dan dapat diakses publik.

- c. Cepat tanggap (*responsif*); aparat pemerintah harus cepat tanggap dan segera mengambil prakarsa penanggulangan terhadap berbagai permasalahan sosial yang muncul di masyarakat. Selain itu, birokrasi juga harus mengakomodasi aspirasi masyarakat sekaligus menindak-lanjutinya dalam bentuk peraturan/kebijakan, kegiatan atau program yang diusulkan.
- d. Bertanggungjawab/bertanggungugat (*akuntabel*); penyelenggara pemerintahan harus menerapkan prinsip akuntabilitas atau bertanggungjawab/tanggung gugat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini diawali pada saat penyusunan program pelayanan publik dan pembangunan, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan, dan penilaian kinerja, sehingga program tersebut dapat memberikan hasil seoptimal mungkin

sesuai dengan sasaran atau tujuan yang ditetapkan.

- e. Profesional dan kompeten; di dalam pemberian pelayanan publik dan pembangunan dibutuhkan aparat pemerintahan yang memiliki kualifikasi dan kemampuan tertentu, dengan profesionalisme yang sesuai. Dibutuhkan upaya untuk menempatkan aparat secara tepat, dengan memperhatikan kecocokan antara tuntutan pekerjaan dengan kualifikasi kemampuan dan profesionalisme.
- f. Efisien dan efektif; agar dapat meningkatkan kinerja tata pemerintahan baik di pusat maupun daerah dibutuhkan struktur yang tepat. Untuk tercapainya hal ini, pemerintah perlu secara periodik melakukan evaluasi terhadap dukungan struktur yang ada, disertai dengan perubahan jika dipandang perlu, yang meliputi perubahan struktur, tugas pokok jabatan dan fungsi.
- g. Desentralistis; upaya pendelegasian kewenangan pusat ke daerah dalam rangka otonomi daerah telah dilakukan. Namun hal ini belum cukup. Masih diperlukan pendelegasian kewenangan di daerah

dari Bupati/Walikota kepada dinas – dinas atau badan/lembaga teknis yang ada dibawahnya disertai dengan pemberian sumber daya pendukungnya.

- h. Demokratis; perumusan kebijakan tentang pelayanan publik dan pembangunan di pusat dan daerah dilakukan melalui mekanisme demokrasi, dan tidak ditentukan sendiri oleh eksekutif. Dalam konteks ini wakil – wakil rakyat di DPR/D diberi akses untuk secara aktif menyuarakan kepentingan masyarakat dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat sampai terwujud secara nyata.
- i Mendorong partisipasi masyarakat; partisipasi masyarakat mutlak diperlukan agar penyelenggara pemerintahan dapat mengenal lebih dekat siapa masyarakat dan warganya berikut cara pikir dan kebiasaan hidupnya, masalah yang dihadapi, cara atau jalan keluar yang disarankan, apa yang dapat disumbangkan dalam memecahkan masalah yang dihadapi, dan lain sebagainya. Kehadiran masyarakat dalam forum pertemuan publik dan keaktifan mereka dalam memberikan saran dan masukan menunjukkan

bahwa urusan pemerintahan juga menjadi urusan mereka dan bukan semata urusan birokrat.

- j. Mendorong kemitraan dengan swasta dan masyarakat; masyarakat dan sektor swasta harus diberdayakan lewat pembentukan kerjasama atau kemitraan antara pemerintah dengan swasta, pemerintah dengan masyarakat, dan antara swasta dengan masyarakat. Kemitraan ini harus didasarkan pada kebutuhan yang nyata pada masing - masing pihak bukan sekedar untuk memenuhi persyaratan saja. Wujud nyata dari kemitraan ini adalah perbaikan sistem pelayanan kepada masyarakat dan sektor swasta.
- k. Menjunjung supremasi hukum; dalam pemberian pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan seringkali terjadi pelanggaran hukum. Dalam konteks ini, siapa saja yang melanggarnya harus diproses dan ditindak secara hukum atau sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku. Wujud nyata dari prinsip supremasi hukum antara lain mencakup upaya pembentukan peraturan perundangan, pemberdayaan lembaga penegak hukum, penuntasan kasus KKN dan

pelanggaran HAM, peningkatan kesadaran hukum, dan pengembangan budaya hukum.

- l. Berkomitmen pada pengurangan kesenjangan; aparat pemerintahan harus berupaya memperkecil kesenjangan yang terjadi di antara masyarakat. Kesenjangan ini dapat berupa kesenjangan ekonomi, sosial, gender, dan budaya. Kesenjangan dapat terjadi antara pusat dan daerah, antar daerah, antar golongan, dan lain sebagainya. Adanya kesenjangan merupakan insentif negatif bagi upaya pembangunan.
- m. Berkomitmen pada tuntutan pasar; pengalaman membuktikan bahwa campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi seringkali berlebihan sehingga akhirnya membebani anggaran belanja dan bahkan merusak pasar. Upaya pengaitan kegiatan ekonomi masyarakat dengan pasar baik di dalam daerah maupun antar-daerah merupakan contoh wujud nyata penerapan prinsip tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada pasar.
- n. Berkomitmen pada lingkungan hidup, masalah lingkungan dewasa ini telah berkembang menjadi isu yang sangat penting baik pada tataran nasional

maupun internasional. Hal ini berakar pada kenyataan bahwa daya dukung lingkungan semakin lama semakin menurun akibat pemanfaatan yang tidak terkendali. Kewajiban penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan secara konsisten, program reboisasi, penegakan hukum lingkungan secara konsekuen, merupakan contoh perwujudan tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada lingkungan. (Wigrantoro, 2004 : 3-5)

C. MANAJEMEN

Pengertian manajemen dapat digunakan untuk mengkaji proses keputusan oleh pimpinan (manajer) tentang penggunaan orang lain dalam menyelesaikan berbagai macam tugas-tugas organisasi, hal ini di dasarkan pada pemikiran bahwa dalam kegiatan setiap hari manajer akan selalu dihadapkan pada proses pengambilan keputusan yang akan berhubungan dengan kegiatan mencapai tujuan organisasi yang dikelolanya. Dengan demikian, manajer harus cakap memanfaatkan sumber daya manusia yang ada dalam organisasinya, sehingga dapat tercipta proses kerja sama yang dinamis dan harmonis, serta produktif, diperlukan komitmen antara manajer dan staf

Sumber Daya Manusia tentang visi, misi dan tujuan organisasi dan hal-hal lain yang terkait dengan proses pencapaian tujuan. Komitmen manajemen antara pimpinan dan Sumber Daya Manusia (staf) harus dikembangkan dan dihayati oleh seorang manajer untuk menghindari sikap negatif staf yang merasa dimanfaatkan oleh pimpinannya untuk mencapai tujuan individu pribadi pimpinan. Untuk menerapkan manajemen pada suatu organisasi diperlukan kejelasan rumusan tujuan yang hendak dicapai dalam organisasi itu. Tujuan itu harus disosialisasikan oleh pimpinan kepada staf sehingga dihayati oleh semua pihak, baik unsur pimpinan maupun unsur karyawan. Dengan demikian, semua aktivitas organisasi departemen, unit kerja dan sebagainya akan selalu diarahkan untuk pencapaian tujuan organisasi yang telah disepakati dan dihayati bersama. (Henny, 1999:32)

Banyak pakar mengemukakan tentang fungsi manajemen, ada yang mengemukakan empat macam dan ada juga yang mengemukakan enam macam. Namun, pada hakekatnya mempunyai tujuan yang sama.

Salah satu pakar manajemen mengemukakan fungsi manajemen yaitu Anak Agung Gde Maninjaya (2004: 54) sebagai berikut:

1. Perencanaan (*Planning*)
2. Pengorganisasian (*Organizing*)

3. Penggerakan dan Pelaksanaan (*actuating*)
4. Pengawasan dan Pengendalian (*controlling*)

Rumusan fungsi manajemen di atas dikutip dari pendapat Henry Fayol (1916) adalah salah satu pakar menulis manajemen ilmiah menjelaskan fungsi administrasi (manajemen) terdiri atas:

1. *Planning*
2. *Organizing*
3. *Command*
4. *Cordination*
5. *Controlling*

Bahkan ada pakar yang mengemukakan fungsi-fungsi manajemen selain yang telah dikemukakan di atas, ia menambahkan tentang keuangan (*budgeting*) dan laporan (*reporting*) dan sebagainya. (Bayu Swastana, 2005:7)

D. KONSEP KEMISKINAN

Menurut Andre Bayo Ala (1981:2), kemiskinan itu bersifat multi dimensional artinya kebutuhan manusia itu bermacam-macam maka kemiskinanpun memiliki banyak aspek antara lain:

1. Aspek primer berupa :
 - a. Miskin aset
 - b. Organisasi sosial politik
 - c. Pengetahuan dan keterampilan

2. Aspek sekunder berupa:

- a. Jaringan sosial
- b. Sumber keuangan dan informasi

Penyebab kemiskinan:

1. Karena ciri dan keadaan masyarakat dalam suatu daerah sangat beragama (berbeda) ditambah dengan kemajuan ekonomi dan pertumbuhan yang masih rendah.
2. Kebijakan dalam negeri sering kali dipengaruhi oleh kebijakan luar negeri atau internasional dari segi pendanaan.

Ada 2 macam ukuran kemiskinan yang umum dan dikenal, antara lain:

1. Kemiskinan absolut

Konsep kemiskinan pada umumnya selalu dikaitkan dengan pendapatan dan kebutuhan, kebutuhan tersebut hanya terbatas pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar.

Kemiskinan dapat digolongkan dalam 2 bagian yaitu :

- a. Kemiskinan untuk memenuhi kebutuhan dasar
 - b. Kemiskinan untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi
2. Kemiskinan relatif

Menurut Kincaid (1989:35), semakin besar ketimpangan antara tingkat hidup orang kaya dan miskin maka semakin besar jumlah penduduk yang selalu miskin, sehingga Bank Dunia membagi

aspek tersebut dalam 3 bagian, antara lain:

- a. Jika 40 % penduduk berpendapatan rendah menerima kurang dari 12 % pendapatan nasionalnya, maka pembagian pembangunan sangat timpang.
- b. Apabila 40 % lapisan penduduk berpendapatan rendah menikmati antara 12-17 % pendapatan nasional dianggap sedang.
- c. Jika 40 % dari penduduk berpendapatan menengah menikmati lebih dari 17 % pendapatan nasional maka dianggap rendah.

Strategi/kebijakan dalam mengurangi kemiskinan

1. Pembangunan sektor pertanian

Sektor pertanian memiliki peranan penting di dalam pembangunan karena sektor tersebut memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pendapatan masyarakat di pedesaan, berarti akan mengurangi jumlah masyarakat miskin. Terutama sekali teknologi di sektor pertanian dan infrastruktur.

2. Pembangunan sumber daya manusia

Sumber daya manusia merupakan investasi insani yang memerlukan biaya cukup besar, diperlukan untuk mengurangi kemiskinan dan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum, maka dari itu peningkatan lembaga pendidikan, kesehatan dan gizi merupakan langkah yang baik untuk diterapkan oleh pemerintah.

3. Peranan lembaga swadaya masyarakat

Mengingat LSM memiliki fleksibilitas yang baik di lingkungan masyarakat sehingga mampu memahami komunitas masyarakat dalam menerapkan rancangan dan program pemberantasan kemiskinan.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung:

1. Tingkat kemiskinan cukup banyak
2. Mulai dari tingkat dan laju pertumbuhan output (produktivitas tenaga kerja)
3. Tingkat inflasi
4. Tingkat investasi
5. Alokasi serta kualitas sumber daya alam
6. Tingkat dan jenis pendidikan.
7. Etos kerja dan motivasi kerja

Sedikitnya ada 2 macam perspektif yang lazim dipergunakan untuk mendekati masalah kemiskinan, antara lain:

1. Perspektif kultural (*cultural perspective*), yang dibagi dalam 3 tingkat analisis, yaitu:

- a. Individual
- b. Keluarga
- c. Masyarakat

2. Perspektif struktural atau situasional (*situational perspective*)

Pemerintah telah mencanangkan 2 pokok kebijaksanaan pembangunan yaitu :

- a. Mengurangi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan
- b. Melaksanakan 8 jalur pemerataan yang meliputi :
 - a. Pemerataan pembagian pendapatan
 - b. Penyebaran pembangunan di seluruh daerah
 - c. Berusaha
 - d. Kesempatan memperoleh pendidikan
 - e. Kesehatan
 - f. Kesempatan kerja

E. PENGELOLAAN PROYEK PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN

1. Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Prinsip, dan Nilai Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan

Proses penanganan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan dimulai dengan kegiatan orientasi pemahaman substansi proyek kepada semua pihak pelaksana proyek mulai dari tingkat pusat sampai tingkat kelurahan, baik pemerintah, konsultan, maupun fasilitator. Maksudnya agar semua komponen pelaku maupun pihak terkait terlebih dahulu memahami secara utuh dan memiliki persepsi yang sama tentang visi, misi, tujuan, strategi, prinsip dan nilai serta mekanisme pelaksanaan proyek benar-benar direalisasikan di lapangan atau di masyarakat.

Adapun visi, misi, tujuan, strategi dan nilai yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Visi

Masyarakat yang berdaya yang mampu menjalin sinergi dengan pemerintah daerah serta kelompok peduli setempat dalam rangka menanggulangi kemiskinan dengan efektif, secara mandiri dan

berkelanjutan (Imam Krimanto, 2003:18).

b. Misi

Memberdayakan masyarakat perkotaan, terutama masyarakat miskin, untuk menjalin kerjasama sinergis dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli lokal dalam upaya menanggulangi kemiskinan, melalui pengembangan kapasitas, penyediaan sumber daya, dan melembagakan budaya kemitraan antar pelaku pembangunan. (Imam Krimanto, 2004:18).

c. Prinsip

Prinsip-prinsip yang harus dijunjung tinggi, ditumbuh kembangkan dan dilestarikan oleh semua pelaku Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (baik masyarakat, konsultan, maupun pemerintah) dalam melaksanakan proyek ini adalah :

1. **Demokrasi** : dalam setiap proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak, terutama kepentingan masyarakat miskin maka mekanisme pengambilan keputusan dalam pelaksanaan proyek ini dilakukan secara

kolektif dan demokrasi. Untuk itu masyarakat didorong agar mampu membangun dan memperkuat organisasi masyarakat warga dengan representasi, yang akseptabel, inklusif, transparan, demokrasi dan akuntabel.

2. Partisipasi : dalam setiap langkah kegiatan proyek ini harus dilakukan secara partisipatif sehingga mampu membangun rasa kepemilikan dan proses belajar melalui kerjasama. Partisipasi dibangun dengan menekankan proses pengambilan keputusan oleh warga, mulai dari tataran ide/gagasan, perencanaan, pengorganisasian, pemupukan sumber daya, pelaksanaan hingga evaluasi dan pemeliharaan. Partisipasi juga berarti upaya melibatkan segenap komponen masyarakat, khususnya kelompok masyarakat yang rentan dan selama ini tidak memiliki peluang/akses dalam program atau kegiatan setempat.
3. Transparansi dan akuntabilitas : dalam proses manajemen proyek maupun manajemen organisasi masyarakat harus menerapkan prinsip transparansi dan

akuntabilitas, sehingga masyarakat belajar dan melembagakan sikap bertanggungjawab serta tanggung gugat terhadap pilihan keputusan dan kegiatan yang dilaksanakannya. Termasuk terbuka untuk diperiksa oleh BPKP, auditor atau pemeriksaan oleh masyarakat sendiri dan pihak terkait lainnya, serta menyebarluaskan hasil pemeriksaan dan audit tersebut ke masyarakat, pemerintah, lembaga donor serta pihak-pihak lainnya.

4. Desentralisasi : dalam proses pengambilan keputusan yang langsung menyangkut kehidupan dan penghidupan masyarakat agar dilakukan sedekat mungkin dengan pemanfaatan atau diserahkan kepada masyarakat sendiri, sehingga keputusan yang dibuat benar-benar bermanfaat bagi masyarakat banyak (Imam Krimanto, 2003:18).

d. Nilai

Nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi, ditumbuhkembangkan dan dilestarikan oleh semua pelaku proyek (baik masyarakat, konsultan, pemerintah, maupun kelompok

peduli), dalam melaksanakan proyek ini adalah :

1. Dapat dipercaya : semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan ini harus benar-benar dapat menjaga kepercayaan yang diberi masyarakat maupun pemerintah untuk menerapkan aturan main Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan dengan baik dan benar. Dengan demikian, pemilihan pelaku-pelaku proyek ini di tingkat masyarakatpun harus menghasilkan figur-figur yang benar-benar dipercaya masyarakat sendiri, bukan semata mempertimbangkan status sosial, pengamalan serta jabatan.
2. Ikhlas/kerelawanan : dalam melaksanakan kegiatan yang berkenaan dengan proyek ini benar-benar berlandaskan niat ikhlas untuk turut memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin yang ada diwilayahnya, dan tidak mengharapkan materi, jasa, maupun mengutamakan kepentingan pribadi serta golongan atau kelompoknya.
3. Kejujuran ; dalam proses pengambilan keputusan,

pengelolaan dana serta pelaksanaan kegiatan proyek ini harus dilakukan dengan jujur, sehingga tidak dibenarkan adanya upaya-upaya untuk merekayasa, memanipulasi maupun menutup-nutupi sesuatu, yang dapat merugikan masyarakat miskin serta menyimpang dari visi, misi dan tujuan proyek ini.

4. Keadilan ; dalam menetapkan kebijakan dan melaksanakan proyek ini harus menerapkan asas keadilan (*fairness*), kebutuhan nyata dan kepentingan masyarakat miskin. Keadilan dalam hal ini tidak berarti sekedar pemerataan.
5. Kesetaraan ; dalam pelibatan masyarakat pada pelaksanaan dan pemanfaatan proyek ini, tidak membeda-bedakan latar belakang, asal usul, agama, status, maupun jenis kelamin dan lain-lainnya. Semua pihak diberi kesempatan yang sama untuk terlibat dan/atau menerima manfaat proyek ini, termasuk dalam proses pengambilan keputusan.
6. Kebersamaan dan Keberagaman ; dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan kemiskinan perlu dioptimalkan gerakan masyarakat,

melalui kebersamaan dan kesatuan masyarakat, sehingga kemiskinan benar-benar menjadi urusan semua warga masyarakat dari berbagai latar belakang, suku, agama, mata pencaharian, budaya, pendidikan, dan sebagainya, dan bukan hanya menjadi urusan dari masyarakat miskin atau pelaku Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan atau sekelompok elit saja. (Imam Krimanto, 2003:19).

e. Tujuan

1. Membangun atau mengukuhkan kelembagaan masyarakat yang representatif dan akuntabel yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin perkotaan serta memperkuat suara masyarakat miskin dalam proses pengambilan keputusan lokal.
2. Mendorong pemerintah daerah untuk makin mampu memenuhi kebutuhan masyarakat miskin, melalui peningkatan kemitraan dengan kelembagaan masyarakat (Organisasi masyarakat warga).
3. Meningkatkan akses bagi masyarakat miskin perkotaan, pelayanan sosial, prasarana dan

sarana, pendanaan dan lain-lain. (Imam Krimanto, 2003:20).

f. Strategi

Memberdayakan pelaku-pelaku pembangunan strategi dan masyarakat agar mampu membangun dan menanggulangi kemiskinan secara mandiri melalui :

1. Membangun kapasitas masyarakat miskin perkotaan untuk mampu membentuk serta melembagakan kelembagaan representatif masyarakat yang akuntabel terhadap masyarakat. Kelembagaan masyarakat ini yang selanjutnya diperkuat kapasitasnya agar mampu menjadi motor penggerak penggalian serta pelembagaan nilai-nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan.
2. Penyediaan akses secara langsung ke sumber daya kunci yang dibutuhkan masyarakat miskin dalam bentuk Dana Bantuan Langsung Masyarakat yang dikelola kelembagaan masyarakat, yakni organisasi masyarakat warga (BKM) secara transparan serta akuntabel.
3. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah untuk bermitra

dengan organisasi masyarakat warga dalam penyediaan pelayanan umum, melalui penyediaan serta pengembangan Bantuan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET). (Imam Krimanto, 2003:23).

F. PEMBAHASAN

1. Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan

1. Partisipasi (*Participation*)

Partisipasi merupakan upaya melibatkan segenap yang selama ini tidak memiliki peluang/akses dalam program/kegiatan setempat. Partisipasi dibangun dengan menekankan pada proses pengambilan keputusan oleh warga, mulai dari tataran ide/gagasan hingga evaluasi. Salah satu tujuan dari partisipatif yaitu untuk membangun rasa kepemilikan dan proses belajar melalui bekerja bersama. Berdasarkan data dari hasil penelitian masih ditemukan kurangnya partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan. Jadi dapat disimpulkan, prinsip partisipasi belum dapat diterapkan secara maksimal.

2. Aturan Hukum (*Rule of Law*)

Peningkatan pembangunan dan efisiensi nasional membutuhkan penyesuaian kebijakan dan perangkat perundang-undangan, namun tidak berarti harus mengabaikan kepastian hukum. Tegaknya hukum yang berkeadilan merupakan jasa pemerintah yang teramat sulit diwujudkan namun mutlak diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Adanya kepastian hukum merupakan indikator profesionalisme dan syarat bagi kredibilitas pemerintahan, sebab bersifat vital dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Tegaknya kepastian hukum juga mensyaratkan kecermatan dalam penyusunan berbagai kebijakan pembangunan. Sebab berbagai kebijakan publik tersebut pada akhirnya harus dituangkan dalam sistem perundang-undangan untuk memiliki ketentuan hukum, dan harus mengandung kepastian hukum. Berdasarkan hasil wawancara juga diperoleh informasi bahwa masih banyak pengaduan masyarakat yang tidak ditanggapi secara serius. Sedangkan aturan yang ada menghendaki agar penanganan pengaduan masyarakat harus menganut beberapa kaidah, seperti: kemudahan, cepat, tepat, tanggap, terbuka,

satu pintu, rahasia dan aman. Sehingga dapat disimpulkan penerapan prinsip aturan hukum dalam pengelolaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan belum dapat dilaksanakan secara optimal.

3. Transparansi (*Transparency*)

Aparatur dan sistem manajemen pemerintahan harus mengembangkan keterbukaan (transparansi) untuk mendorong para pimpinan dan sumber daya manusia yang ada didalamnya berperan dalam mengamalkan dan melembagakan kode etik, serta dapat menjadikan diri mereka sebagai panutan masyarakat dalam rangka pelaksanaan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Keterbukaan dalam Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan termasuk terbuka untuk diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Pusat, auditor atau pemeriksa oleh masyarakat sendiri dan pihak terkait lainnya.

Berdasarkan hasil observasi atau pengamatan langsung di lapangan ditemukan bahwa prinsip transparansi telah berusaha untuk diterapkan dengan adanya papan pengumuman untuk setiap hasil kegiatan, akan tetapi pada dasarnya masih ditemukan adanya kekurangan-kekurangan, misalnya : pengaduan masyarakat yang masih ditutup-tutupi. Jadi kesimpulannya penerapan

transparansi masih harus lebih dioptimalkan, bahkan harus mendapat perhatian yang cukup serius dari pengelola Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan.

4. Daya Tanggap (*Responsiveness*)

Upaya pemberdayaan memerlukan semangat untuk melayani masyarakat dan menjadi mitra masyarakat atau melakukan kerjasama dengan masyarakat. Agar hal ini bias terwujud diperlukan perubahan perilaku melalui pembudayaan kode etik yang didasarkan pada dukungan lingkungan yang diterjemahkan dalam standar tingkah laku yang dapat diterima umum dan dijadikan acuan perilaku pemerintah. Intinya bahwa setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan hasil pengamatan atau observasi yang dilakukan juga ditemukan masih banyak pengurus yang kurang aktif, sementara mereka berada pada posisi pelayan atau mitra masyarakat. Jadi secara otomatis dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip responsif dalam pengelolaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan ini masih perlu dioptimalkan melalui peningkatan kinerja pengelola.

5. Berorientasi Konsensus (*Consensus Orientation*)

Pemerintahan yang baik akan bertindak sebagai penengah (mediator) bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesepakatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak dan jika dimungkinkan juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.

Dari hasil wawancara (*interview*) juga diperoleh informasi yang cukup relevan. Salah satu contoh konkrit yaitu pada saat dilaksanakan rapat/ musyawarah hanya sebagian kecil pengurus ataupun masyarakat yang hadir, hal ini sangat berpengaruh pada pengambilan keputusan. Jadi kesimpulannya bahwa penerapan prinsip konsensus masih perlu dibenahi dan dioptimalkan.

6. Berkeadilan (*Equity*)

Penetapan kebijakan dan pelaksanaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan ini harus menerapkan prinsip keadilan untuk kebutuhan nyata dan kepentingan masyarakat pada pelaksanaan dan pemanfaatan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan, tidak membedakan latar belakang, asal usul, agama, status maupun jenis kelamin, dan lain-lain. Semua pihak diberi kesempatan yang

sama untuk terlibat dan/atau menerima manfaat Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan, termasuk dalam proses pengambilan keputusan.

Berdasarkan hasil wawancara (*interview*) dari pihak informan diperoleh informasi bahwa masih terjadi diskriminasi dalam pengelolaan proyek ini.. Jadi kesimpulannya, penerapan prinsip berkeadilan masih perlu dioptimalkan dengan mencari solusi terhadap hambatan-hambatan yang ditemukan.

7. Efektivitas dan Efisiensi (*Effectiveness and Efficiency*)

Proses kegiatan dan kelembagaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan ini diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat miskin melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya terhadap berbagai sumber-sumber yang tersedia. Dalam hal ini yang perlu dipahami bahwa efektivitas dan efisiensi hanya dapat diwujudkan apabila prinsip-prinsip yang lain telah dapat dioptimalkan, sedangkan pada kenyataannya masih terdapat beberapa kekurangan, sehingga dapat dikatakan penerapan prinsip efektivitas dan efisiensi ini belum dapat diwujudkan secara optimal.

8. Akuntabilitas (*Accountability*)

Proses manajemen proyek maupun manajemen organisasi masyarakat harus menerapkan prinsip akuntabilitas, sehingga sektor publik, swasta, dan masyarakat belajar dan melembagakan sikap bertanggungjawab serta tanggung gugat terhadap pilihan keputusan dan kegiatan yang dilaksanakannya. Berdasarkan hasil pengamatan dari penerapan prinsip-prinsip yang sebelumnya khususnya prinsip transparansi masih belum bisa diterapkan secara optimal. Karena antara prinsip yang satu dengan prinsip yang lain saling berhubungan, sehingga pada akhirnya pertanggungjawaban dari pengurus akan penuh dengan justifikasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan belum dapat dilaksanakan secara optimal.

9. Bervisi Strategis

Visi strategis ini dimaksudkan agar para pimpinan dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia (*Human Development*). Bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan serta mereka memahami aspek-aspek historis, kultural, dan

kompleksitas sosial yang mendasari perspektif mereka. Sesuai dengan visi dari Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan yaitu mewujudkan masyarakat berbudaya yang mampu menjalin sinergis dengan pemerintah daerah serta kelompok peduli setempat dalam rangka menanggulangi kemiskinan dengan efektif, secara mandiri dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil pengamatan terhadap kinerja pengurus, ternyata masih banyak yang kurang memiliki tanggungjawab terhadap tugasnya. Dari sinilah dapat disimpulkan bahwa prinsip visi strategis dalam pengelolaan proyek ini masih sulit untuk diwujudkan.

10. Hambatan

Hambatan merupakan tantangan terbesar dalam pencapaian tujuan organisasi. Dalam pengelolaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan ini pun pasti mengalami hambatan-hambatan. Terbukti dari tanggapan responden (pengurus BKM) yang menjawab sering sebanyak 46 responden atau sekitar 75,41 %.

2. Faktor-faktor Penghambat Penerapan Good Governance dalam Pengelolaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan

Hasil penelitian di atas telah membuktikan bahwa apa yang ditawarkan pada hipotesis awal sangat relevan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan, yaitu terdapat beberapa faktor penghambat dalam penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan, antara lain :

- a. Kurang optimalnya kinerja pengurus. Hal ini disebabkan oleh kurangnya insentif yang diterima oleh pihak pengelola Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
- b. Budaya kekeluargaan yang masih kental yang memberi peluang terjadinya praktek KKN, akibatnya proses refleksi kemiskinan menjadi kurang objektif atau kurang tepat sasaran.
- c. Tidak optimalnya kemitraan atau sinergi antara pihak publik, swasta dan masyarakat. Dalam hal ini masyarakat terkesan kurang memiliki kesadaran dan kurang memiliki rasa tanggungjawab moral dalam setiap kegiatan Proyek Penanggulangan Kemiskinan.

G. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- a. Penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan, belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Tercermin dari hasil penelitian ini yang menunjukkan tingkat penerapannya hanya sekitar 36,49 %.
- b. Faktor-faktor yang menghambat penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan:
 - 1) Kinerja pengurus yang kurang optimal, dengan tingkat persentase sebesar 34,57 %. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran terhadap tugas dan tanggungjawab.
 - 2) Budaya kekeluargaan yang masih kental, dengan tingkat persentase sebesar 48,14 %. Sehingga dalam refleksi kemiskinan masih kurang obyektif atau kurang tepat sasaran.
 - 3) Kurangnya partisipasi masyarakat, dengan tingkat persentase 48,15 %. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran dan rasa kepemilikan program tersebut.

2. Saran

- a. Penerapan prinsip *good governance* seharusnya didukung dengan adanya upaya perbaikan kesejahteraan pengurus atau pengelola proyek.
- b. Menghilangkan budaya kekerabatan yang berpotensi pada kolusi dalam penyelenggaraan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan ini serta mengutamakan asas pertanggungjawaban dalam setiap kegiatan.
- c. Aturan hukum harus ditegakkan secara optimal, khususnya dalam pengelolaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan ini.
- d. Diharapkan agar seluruh komponen (*stakeholder*) memiliki pemahaman yang sama akan pentingnya prinsip *good governance* dalam pengelolaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriyadi, Teguh. 2008. *Good Governance*.
<http://www.depkoinfo.go.id/portal/?act=detail&mod=artikelitjen&view=1&id=BRT0705111106>
01. 16 Juni 2008. hlm : 1-4.
- Andre Bayo Ala, 1981. *Konsep Kemiskinan*.
Kencana. Surabaya

- Bagong Suyanto - Sutinah. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Kencana. Surabaya.
- Edy Topo Ashari - Desi Fernanda. 2004. *Membangun Kepemerintahan yang Baik* Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Jakarta.
- Kincaid, 1989. *Kemiskinan*. Sinar Baru. Bandung
- Krimanto. Imam. dkk. 2003. *Pedoman Umum Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)*. Dirjen Perumahan dan Permukiman dan Prasarana Wilayah. Jakarta.
- _____2003. *Pedoman Teknis Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia (P2KP) Dirjen Perumahan dan Permukiman*. Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah. Jakarta.
- Maninjaya, A.A.G. 2004. *Manajemen Kesehatan*. EGC . Jakarta.
- Partoatmojo. Satdji. 2004. *Masalah Kemiskinan dan Komplexitas Penanggulangannya*. TLP2 KPK Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Jakarta.
- Romanus. 2007. *Keterbukaan Informasi dan Reformasi Birokrasi*.
<http://jurnalnasional.com/?med=Blog&sec=Eksekutif&rbrk=&id=22584>

- &postdate=2007-11-15&detail=Eksekutif. 16 Juni 2008. hlm : 1.
- Roes Setiyadi, Wigrantoro. 2004. *Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Penerapan Good Governance*. maswig.blogspot.com/2004/12/pemanfaatan-teknologi-informasi-dalam28.html. 16 Juni 2008. hlm : 1-5.
- Rico, Handiman. 2008. *Kebijakan Nasional dalam Perencanaan Tata Ruang*. <http://www.bakosurtanal.go.id/?o=30>. 16 Juni 2008. hlm : 1-6.
- Sugandi Aca. 2003. *Pedoman Umum Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan*. Dirjen Perumahan dan Permukiman, Jakarta.
- Sugiono, 2002, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.
- Sudjana, Nana. 2001. *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*. Sinar Baru. Bandung.
- Sudirman Dedy. 1999. *Dasar-Dasar Manajemen*. Armico. Bandung.
- Swastha, Bayu, dkk. 2005. *Manajemen Pemasaran Modern, Liberty, Jokjakarta*.
- Sumamora, Henny. 1999. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yokyakarta.
- Tim Koordinasi TKP3 KPK, 2004, *Informasi Dasar Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SKP)*. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Jakarta.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 2003. *Good Governance*. Lembaga Administrasi Negara. Jakarta.
- Wardani, Anwar. 2004. *Akar Kemiskinan dan Ketidakberdayaan Masyarakat*. TKP3 KPK Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Jakarta.
- Dokumen-dokumen :
 Keputusan Presiden No. 124. 2001
 Keputusan Presiden Nomor. 2002 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Arsip Sekretariat P2KP. Pangkajene.
 Keputusan Bupati Sidenreng Rappang No.368, 2006 tentang Pembentukan Komite Penanggulangan Kemiskinan Daerah (KPK-D) Kabupaten Sidenreng Rappang, Arsip Sekretariat P2KP. Pangkajene.
 Undang-Undang No.32. 2004, tentang Pemerintah Daerah, Departemen dalam Negeri Republik Indonesia. Jakarta.